

**TNI Angkatan Laut sebagai *World Class Navy*
pada Strategi Pertahanan Indonesia dalam Mewujudkan Poros Maritim Dunia**

Probo Darono Yakti

Departemen Hubungan Internasional

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Airlangga

Abstrak

Visi pemerintahan Presiden Jokowi untuk menjadikan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia, menegaskan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) bergeser dari land-oriented menjadi sea-oriented. Pertahanan dan keamanan laut menjadi sumbu utama yang ditopang dengan keberadaan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI-AL). Jauh sebelum deklarasi Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia, ternyata TNI-AL lebih dahulu mengeluarkan doktrin World Class Navy. Dalam mewujudkannya, TNI-AL harus mencapai Minimum Essential Force (MEF), untuk mewujudkan tentara yang profesional dengan dilengkapi alat utama sistem pertahanan (alutsista). Hal ini menggariskan beragam permasalahan yang harus dihadapi Indonesia khususnya yang dialami TNI-AL. Meskipun anggaran pertahanan menempati porsi APBN tertinggi, namun Indonesia masih jauh dari indikator pertahanan laut yang memadai. Dalam teori strategi kemaritiman, terdapat dua tokoh pemikiran klasik: Alfred Mahan dan Julian Corbett. Keduanya menjadi acuan pencapaian Indonesia dalam strategi militer, mengingat posisi Indonesia berada di persilangan dua benua dan samudera. Indonesia dapat menerapkan sea control sebagai efektivitas penguasaan jalur-jalur perdagangan yang saat ini dikuasai negara kecil seperti Singapura. Atau bisa ditilik dari segi sea power, yang mengategorikan angkatan laut berdasarkan cakupan wilayahnya: brown, green, dan blue water navy. Saat ini TNI-AL masih merupakan green water navy, dengan kapabilitas hanya sebagai alat pengaman pantai saja. Problemnnya kemudian adalah kesiapan TNI-AL dalam mengiringi langkah pemerintah dalam mewujudkan poros maritim dunia. Yang terakhir memberikan saran perwujudan World Class Navy mulai dari serapan anggaran yang tinggi untuk fokus peningkatan alutsista dan pengembangan kemampuan serta peningkatan

kesejahteraan prajurit AL. Mengingat berbagai aspek memang perlu diperhatikan, alih-alih untuk mewujudkan visi besar Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia.

Kata kunci: Sea Power, Sea Control, World Class Navy, *Poros Maritim Dunia*, Minimum Essential Force.

Di awal milenium 2000 ini, kita menghadapi sebuah fenomena dunia yang dinamakan globalisasi. Globalisasi mencakup di dalamnya persaingan yang tak lagi mengenal antar individu, namun antar bangsa dan negara. Arus persaingan ini tidak lain adalah akibat pasar bebas yang mana di dalamnya mencakup deregulasi, penghilangan sekat batas negara, dan arus barang, penduduk, dan jasa yang begitu pesat bertumbuh. Tentu hal ini menggerakkan Indonesia sebagai negara *archipelagist*¹, yakni terdiri dari 17.504 pulau yang dikelilingi oleh perairan yang menutupi dua pertiga dari seluruh wilayahnya. Di dalam konstelasi politik internasional, Indonesia merupakan negara yang memiliki posisi tawar strategis di antara negara-negara tetangga yang mana

dalam era keterbukaan informasi ini bisa dikatakan sebagai kompetitor. Indonesia kemudian menampakkan keaktifannya dalam pelbagai forum regional hingga internasional seperti ASEAN, APEC, EAS, G-20, GNB, IORA, OIC, dan PBB.² Hal ini tentu

² (1) ASEAN: Association of South East Asian Nations, organisasi regional yang berdiri di bawah negara-negara Asia Tenggara. Mulanya digunakan untuk melakukan penangkalan pengaruh Uni Soviet, kini menjadi wadah bagi 10 negara untuk melakukan kerjasama intensif di berbagai bidang. Sesuai Bali Concord II, didirikan ASEAN Community yang mencakup 3 bidang seperti ekonomi, politik-kemanan, dan sosial-budaya; (2) APEC: Asia-Pacific Economic Cooperation, sebuah regionalisme yang terbentuk dari inisiatif Amerika Serikat untuk merangkul negara-negara yang berada di pantai Samudera Pasifik beserta negara-negara Asia dalam bidang ekonomi, (3) EAS: East Asia Summit: perkumpulan petinggi negara-negara di Asia Timur termasuk di dalamnya Asia Tenggara. Isu yang dibahas tidak terbatas mengenai ekonomi, namun juga pertahanan dan keamanan serta subjek diplomasi lainnya; (4) G-20: Group of 20, terdiri dari negara-negara yang memiliki kriteria ekonomi tertentu di dunia yang mampu mengubah kondisi perekonomian dunia. Indonesia merupakan satu-satunya perwakilan Asia Tenggara dalam organisasi tersebut; (5) GNB: Gerakan Non Blok, Gerakan yang diinisiasi pada tahun 1955 dalam Konferensi Asia Afrika dan berlanjut pada pendiriannya pada 1961. Pada masa Perang Dingin bertujuan untuk membentuk kekuatan tandingan di samping Amerika Serikat dan Uni Soviet; (6) IORA: Indian Ocean Rim Association, sebuah asosiasi regional untuk bersama-sama mengamankan kepentingan di

¹ Kriteria “negara kepulauan”, sesuai dengan yang telah disepakati dan tercantum dalam UNCLOS 1982 sebagai hukum positif menyangkut perairan internasional sejak 16 November 1994.

berkaitan dengan upaya Indonesia dalam mewujudkan kepentingan nasional atau dalam istilah hubungan internasional, *national interest*. Serta meningkatkan posisi tawar Indonesia di mata dunia internasional sebagai pertanda bahwa Indonesia merupakan negara besar dan memiliki pengaruh yang besar pula terhadap perkembangan dunia.

Hal ini dimanfaatkan dengan improvisasi dalam kaitannya dengan peningkatan nilai mutu strategis, ketika Presiden Joko Widodo (Jokowi) mendeklarasikan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia. Poros Maritim Dunia menurut hematnya merupakan konsep aplikatif yang mana di dalamnya terdiri dari lima pilar, antara lain: (1) Pembangunan kembali budaya maritim Indonesia; (2) Komitmen menjaga dan mengelola sumber daya laut dengan fokus membangun kedaulatan pangan laut melalui pengembangan industri perikanan dengan menempatkan nelayan; (3) Komitmen mendorong pengembangan infrastruktur

Samudera Hindia; (7) OIC: Organization of Islamic Cooperation, yang menjadi wadah kerja sama bagi negara-negara Islam dunia; (8) PBB: Perserikatan Bangsa-Bangsa, didirikan pada tahun 1945 pasca Perang Dunia II untuk menjaga perdamaian dunia.

dan konektivitas maritim dengan membangun tol laut, pelabuhan laut dalam, logistik, dan industri perkapalan, serta pariwisata maritim; (4) Diplomasi maritim yang mengajak semua mitra Indonesia untuk bekerja sama pada bidang kelautan; dan (5) (Indonesia) sebagai negara yang menjadi titik tumpu dua samudera, berkewajiban membangun kekuatan pertahanan maritim.³ Kelima aspek inilah yang disampaikan Presiden pada lawatannya di dalam East Asia Summit 2014 di Nay Pyi Taw, Myanmar di samping menghadiri KTT ASEAN 2014 di tempat yang sama.

Menurut Budiman Djoko Said visi ini merupakan salah satu RPJMN yang berlaku 5 tahun, yakni seiring dengan masa jabatan seorang Presiden Republik Indonesia. Poros Maritim di sisi lain adalah penjabaran dari visi Jokowi yakni Nawacita⁴ yang menjadi

³ AntaraNews.com, 2014. Di EAS, Jokowi beberkan lima pilar Poros Maritim Dunia. Kamis, 13 November 2014 13:41 WIB. [Online]. Tersedia dalam: <http://www.antaraneews.com/berita/464097/di-eas-jokowi-beberkan-lima-pilar-poros-maritim-dunia> (Diakses pada 30 Mei 2017).

⁴ Sembilan poin Nawacita tersebut, meliputi: (1) Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara, melalui politik luar negeri bebas aktif, keamanan nasional yang terpercaya dan pembangunan pertahanan negara Tri

implementasinya pada bidang kemaritiman. Merujuk pada pidato Presiden Republik Indonesia Joko Widodo yang telah

Matra terpadu yang dilandasi kepentingan nasional dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim; (2) Membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya, dengan memberikan prioritas pada upaya memulihkan kepercayaan publik pada institusi-institusi demokrasi dengan melanjutkan konsolidasi demokrasi melalui reformasi sistem kepartaian, pemilu, dan lembaga perwakilan; (3) Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan; (4) Menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya; (5) Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia melalui peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan dengan program "Indonesia Pintar"; serta peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan program "Indonesia Kerja" dan "Indonesia Sejahtera" dengan mendorong *land reform* dan program kepemilikan tanah seluas 9 hektar, program rumah kampung deret atau rumah susun murah yang disubsidi serta jaminan sosial untuk rakyat di tahun 2019; (6) Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya; (7) Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik; (8) Melakukan revolusi karakter bangsa melalui kebijakan penataan kembali kurikulum pendidikan nasional dengan mengedepankan aspek pendidikan kewarganegaraan, yang menempatkan secara proporsional aspek pendidikan, seperti pengajaran sejarah pembentukan bangsa, nilai-nilai patriotisme dan cinta Tanah Air, semangat bela negara dan budi pekerti di dalam kurikulum pendidikan Indonesia; (9) Memperteguh kebhinnekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia melalui kebijakan memperkuat pendidikan kebhinnekaan dan menciptakan ruang-ruang dialog antarwarga. Kompas.com. 21 Mei 2014. ""Nawa Cita", 9 Agenda Prioritas Jokowi-JK" dalam News/Nasional, diakses pada 30 Mei 2017. <http://nasional.kompas.com/read/2014/05/21/0754454/.Nawa.Cita.9.Agenda.Prioritas.Jokowi-JK>

disinggung sebelumnya dibacakan pada KTT Asia Timur 2014 di Myanmar. Salah satu dari lima poin rencana pembangunan Indonesia sebagai poros maritim dunia berbunyi:

"sebagai negara yang menjadi titik tumpu dua samudera, Indonesia memiliki kewajiban untuk membangun kekuatan pertahanan maritim. Hal ini diperlukan bukan saja untuk menjaga kedaulatan dan kekayaan maritim kami, tetapi juga sebagai bentuk tanggung jawab kami dalam menjaga keselamatan pelayaran dan keamanan maritim".

(Presiden Joko Widodo pada KTT Asia Timur 2014 Myanmar).

Poin yang diangkat Presiden Joko Widodo ini kemudian menjadi acuan penting dalam Rencana Strategis 2015-2019 Kementerian Luar Negeri yang didasari dengan penguatan diplomasi maritim Indonesia. Memperkuat kepemimpinan dan peran Indonesia sebagai negara maritim dalam kerja sama internasional untuk

memajukan kepentingan nasional.⁵ Oleh sebab itu, konsekuensi terhadap penerapan fokus pemerintah Indonesia terhadap kebijakan maritimnya mau tidak mau harus melihat permasalahan keamanan laut yang masih banyak perlu dicari titik lemahnya untuk diperbaiki. Tentu saja tanpa melepaskan daratan sebagai salah satu sumber daya strategis yang dapat dimanfaatkan dan menjadi satu kesatuan antara tanah dan air. Kasus-kasus perompakan dan perampokan bersenjata menjadi jamak terjadi di sekitar selat Malaka yang merupakan salah satu selat paling sibuk di dunia saat ini. Dalam hal ini, respons pemerintah terhadap ancaman ketahanan maritim Indonesia diperlukan dalam bentuk strategi keamanan nasional. Menurut Budiman Djoko Said dalam buku *Kemaritiman Indonesia*, strategi keamanan nasional sendiri dapat dilihat sebagai *display*, gelar arahan umum penggunaan semua instrumen kekuatan nasional guna mempromosikan, mendorong, memelihara, serta menjaga dan mengamankan objektif

kepentingan nasional tercapai ke dunia luar.⁶

Secara khusus dalam membahas strategi kemaritiman Indonesia yang mengikuti visi Poros Maritim Dunia gagasan Jokowi, maka untuk menuju ke arah itu Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI-AL) sebagai alat negara untuk mengamankan lautan yang sepenuhnya kedaulatan Indonesia telah lebih dahulu merespons RPJP yang dibuat Presiden SBY yang telah disebutkan penulis sebelumnya. TNI-AL membuat paradigma baru dengan visi yang digagas oleh Laksamana TNI (purn.) Dr. Marsetio, yakni mewujudkan TNI-AL sebagai *World Class Navy*. Buah pemikiran Laksamana Marsetio yang tertuang dalam sebuah buku yang berjudul *Sea Power Indonesia*, berbicara banyak mengenai kondisi terkini yang ada di Indonesia, yang terutama sekali berbicara kondisi angkatan laut dari segi alat utama sistem pertahanan (alutsista) maupun kualitas dan kuantitas personel.

Hal ini dibarengi dengan prioritas pembangunan Angkatan Laut Indonesia yang menghendaki target melampaui

⁵ Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. *Renstra Kemenlu 2015-2019*, 2015, hal. 23.

⁶ Ignasius Basis Susilo (ed.), 2015. *Kemaritiman Indonesia: Problem Dasar Strategi Kemaritiman Indonesia*. Surabaya: CSGS. Hal. 59.

Minimum Essential Force (MEF) 2010 sampai dengan 2024. Terdiri dari tingkat kemampuan, kekuatan, dan pola gelar kekuatan. Kekuatan pokok minimal inilah yang nantinya kemampuan akan dipatok sebesar luasan wilayah Indonesia dan jumlah penduduk yang ada di Indonesia. Dengan demikian TNI Angkatan Laut dapat menjadi alat utama dalam pertahanan negara yang memiliki kapabilitas sesuai dengan kemungkinan risiko yang terjadi manakala ancaman-ancaman yang dapat suatu saat datang. Secara teknis, MEF yang akan dicapai TNI-AL adalah 151 KRI, 54 pesawat udara, dan 333 kendaraan taktis. Kemudian lebih lanjut Marsetio memaparkan jumlah batalion Angkatan Laut yang dibutuhkan Indonesia untuk mencapai MEF. Hal-hal yang telah disebutkan penulis di atas yang ditekankan oleh TNI-AL untuk mencapai predikat *World Class Navy*. Dan pada akhirnya penulis berhipotesis bahwa dengan menggunakan proposisi yang diajukan oleh Marsetio disertai dengan komitmen serius Indonesia dalam mewujudkan Poros Maritim Dunia, maka Indonesia akan mencakupi seluruh teori yang digagas Alfred Thayer Mahan dan Julian Stafford Corbett. Sebagai sebuah

proposisi teoritis, didapatkan perkembangan kasus yang berpotensi dapat menjegal teori yang ada.

Seorang kapten kapal, yang merupakan ahli sejarah dan ahli geostrategi Alfred Thayer Mahan, menulis sebuah buku berjudul “*The Influence Of Sea Power Upon History, 1660 – 1783*”. Di dalam buku yang menginspirasi Amerika Serikat mengalahkan dominasi Inggris dengan Pax Britannica-nya⁷ ini, Mahan menyebutkan enam pokok *sea power* yang meliputi letak geografi (*geographical position*), bangun muka bumi (*physical conformation*), luas wilayah (*extent of territory*), karakter masyarakat (*character of the people*), jumlah penduduk (*number of population*), dan karakter pemerintahan (*character of government*). Lebih lanjut apabila poin-poin tersebut dijabarkan dalam realitas sekaligus progres yang dicapai di Indonesia, Marsetio menjawab dalam bukunya.

Yang pertama adalah posisi geografis Indonesia untuk memaksimalkan *main controller for main maritime traffic*.

⁷ Adityo Nugroho, “*Membedah gagasan A.T Mahan tentang Sea Power*”, dalam *Quarter Deck*, 2 April 2015, diakses 30 Mei 2017. <http://jurnalmaritim.com/2015/04/membedah-gagasan-a-t-mahan-tentang-sea-power/>

Dengan Indonesia memainkan peran ini, Marsetio percaya bahwa pelabuhan-pelabuhan dan pangkalan udara militer yang telah didistribusikan untuk dibangun di seluruh Indonesia sesuai dengan *cost and benefit ratio analysis*⁸ dapat mentransformasikan Indonesia dalam penyesuaian fisik. Pada pokok kedua yakni konfigurasi wilayah, Marsetio mengatakan bahwa Indonesia sebagai negara yang memiliki garis pantai terpanjang kedua di dunia dan memiliki tiga alur kepulauan Indonesia (ALKI) yang meliputi ALKI I, ALKI II, dan ALKI III menjadi kontur jalur laut dalam hal perdagangan dan komunikasi. Disokong pada Pasal 53 ayat 1 UNCLOS 1982 yakni wilayah kedaulatan laut dan udara Indonesia yang mencapai 300 mil laut dari zona tambahan. Kemudian dari ALKI inilah diatur mengenai *innocent passage* dan *choke points* yang telah ditentukan oleh para pemangku kebijakan strategis Indonesia di bidang kemaritiman untuk merumuskan Strategi Pertahanan Laut Nusantara (SPLN) dan Strategi Pertahanan Maritim Indonesia (SPMI).⁹

⁸ Analisis rasio antara ongkos dan keuntungan.

⁹ Marsetio. 2014. *Sea Power Indonesia*. Jakarta: Universitas Pertahanan.

Pokok ketiga yang merupakan faktor luas wilayah, menurut Marsetio digunakan dalam menganalisis perkembangan yang terjadi dalam dunia pelayaran yang terdiri dari asas *cabotage*¹⁰ dan International Ship and Port Safety (ISPS) Code. Kemudian bagaimana Indonesia mempertahankan pulau-pulau terluar miliknya melalui penempatan personil TNI yang efektif. Pokok keempat adalah jumlah penduduk yang dikaitkan dengan umur produktif kerja yakni didapatkan angkatan kerja berjumlah 21%. Untuk dua pokok terakhir yakni karakter bangsa dan pemerintahan, yang ditutup Marsetio dengan kurang meyakinkan namun penulis memilih untuk menggunakan kutipan dari Joko Susanto yang mana di dalam beberapa kesempatan menyatakan bahwa Indonesia terdoktrinasi penjajah Belanda untuk melanjutkan kegiatan bertaninya, sementara Belanda terus menancapkan kuasanya atas lautan di Hindia dan berhak untuk mengeksploitasinya. Dan dapat dikatakan bahwa Indonesia sedang berada tahap untuk menjauhi stigma tersebut seiring dengan visi pemerintahan yang menyatakan

¹⁰ Hak untuk mengoperasikan laut, udara, atau layanan transportasi lainnya dalam suatu wilayah tertentu.

untuk tidak lagi memunggungi samudra, laut, selat, dan teluk yang juga berpatokan pada RPJP 2005. Laksamana Marsetio menekankan pentingnya *Maritime Domain Awareness*.¹¹

Hal ini, lanjut Mahan, membalikkan keadaan yang semulanya merupakan *weakness* (kelemahan) bagi kita, menjadi sebuah *advantage* (keunggulan) dan sebaliknya menjadi titik nadir bagi musuh. Satu konsep penting yang diutarakan Mahan adalah kapabilitas negara dalam mengolah titik-titik penting dalam pelayaran dan perdagangan laut yang disebut *choke points*, untuk ditransformasikan menjadi pelabuhan-pelabuhan transit penting yang dinamakan *hub ports*.¹² Konsep ini secara teknis dapat dicontohkan dengan kehadiran Singapura sebagai negara kota yang mampu menandingi negara-negara raksasa yang berada di sekelilingnya seperti Indonesia dan Malaysia terutama di bidang ekonomi.

Kemudian ada tokoh bernama Julian S. Corbett. Tesisnya berbunyi bahwa negara harus melakukan kontrol terhadap lautan, kebalikan dari Mahan yang menyatakan bahwa negara perlu menguasai laut selayaknya negara mengekspansi daratannya dengan menganeksasi wilayah lain. Bagi Corbett, konsep kontrol yang menurutnya berbeda dari penguasaan ini terletak pada efektivitas sebuah negara dalam menerapkan fungsi penjagaan dan memastikan jalur perdagangan ini aman dari ancaman-ancaman yang lebih penting daripada terfokus pada penjagaan *border* dan perluasan wilayah semata. Corbett memiliki perbedaan persepsi dengan yang diutarakan Mahan, sehingga baginya ada tiga prinsip yang mendasari konsep yang dinamakan *command of the sea* ini: (1) Komando pengamanan, terdiri dari pengambilan keputusan dan kebijakan blokade; (2) Komando perselisihan, yang mana terdiri atas prinsip "*fleet in being*"¹³ dan serangan balik kecil; (3) Komando

¹¹ Lebih lengkap mengenai seabasing dapat dibaca pada Marsetio, Op. Cit. Bab III Maritime Domain Awareness, hal. 43-61.

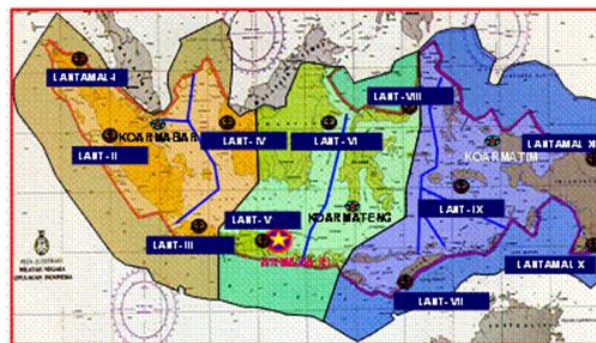
¹² GlobalSecurity.org. 2015. Mahan & The Influence of Sea Power Upon History, diakses pada 30 Mei 2017. <http://www.globalsecurity.org/military/systems/shi/p/mahan.htm>

¹³ *Fleet in being* adalah kekuatan angkatan laut yang membenteng pengaruh kendali tanpa harus meninggalkan pelabuhan. Artinya dengan menjajarkan seluruh angkatan laut yang dimiliki negara sebagai coastal defense yang mana fokus pertahanan beralih menjadi penjagaan pelabuhan dan pantai justru membuat angkatan laut ini memiliki superioritas yang tidak tertandingi.

pelaksanaan, yang mana angkatan laut menurutnya harus bersiap dalam menghadapi invasi, kemudian melakukan serangan dan pertahanan dalam perdagangan, dan yang terakhir penyerangan, pertahanan, dan bantuan untuk ekspedisi-ekspedisi militer. Ketiga prinsip ini yang ditekankan Corbett melalui pemikirannya dalam buku *Principles of Maritime Strategy*.¹⁴ Namun secara luas konsep *command of the sea* kurang relevan diterapkan bagi TNI-AL, belajar dari kegagalan strategi yang dibuat Corbett pada peristiwa kekalahan *Kriegsmarine*¹⁵ pada Perang Dunia II..

Selain itu terkait dengan konsep Corbett mengenai *sea control*¹⁶, Indonesia telah menggunakan sistem Komando Utama (Kotama) dalam angkatan lautnya yang mencakup Komando Armada Barat dan Komando Armada Timur yang beroperasi sesuai wilayah yang telah dibagi

sebelumnya. Dari dua pangkalan utama yang dimiliki Indonesia, saat ini sedang dalam proses pembangunan Pangkalan Utama Armada Timur yang akan secara serentak menaikkan peringkat pelabuhan di Sorong tersebut sebagai pusat distribusi utama dalam menjaga keamanan di wilayah Timur Indonesia. Ke depannya, Indonesia juga berencana menaikkan status Pelabuhan Makassar sebagai Armada Tengah RI yang nantinya dapat lebih efektif dalam membawahi Lantamal yang ada di bawahnya. Sedangkan Surabaya yang semulanya menjadi Armada Timur akan menjadi Armada Pusat RI.¹⁷



Gambar 1: Pembagian wilayah konsentrasi Angkatan Laut

(Sumber: Dinas Penerangan TNI Angkatan Laut, 2015).

¹⁴ Julian Stafford Corbett Corbett, 2004. *Principles of Maritime Strategy*. New York: Dover Publications. Hal. 168.

¹⁵ Angkatan Laut Nazi Jerman

¹⁶ Kebijakan mengamankan *SLOC (Sea line of communications)*, di Indonesia disebut sebagai Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI). Yakni mengamankan jalur-jalur perdagangan penting di lautan sebagai sumber utama perekonomian negara. Dalam hal ini Indonesia sedang fokus untuk mengamankan jalur perdagangan utama yakni ALKI I: Selat Malaka, Selat Sunda dan Selat Karimata.

¹⁷ Merdeka.com. 27 Februari, 2015. "TNI AL akan bangun kekuatan Armada Tengah & Armada Pusat", dalam Peristiwa, diakses pada 30 Mei 2017, <http://www.merdeka.com/peristiwa/tni-al-akan-bangun-kekuatan-armada-tengah-armada-pusat.html>

Sejauh ini yang dapat dianalisis dari kekuatan militer Indonesia adalah konsep pertahanan manajemen lautnya yang masih dalam taraf *green water navy*. Atau angkatan laut yang secara umum hanya bertugas untuk mengontrol perairan-perairan Indonesia yang berada dalam naungan garis-garis batas wilayah hingga batas terluar laut dangkal, wilayah kepulauan, dan pulau-pulau terluar dari suatu negara.¹⁸ Menimbang kapasitas yang dimiliki baik dari kualitas-kuantitas prajurit, hingga kualitas-kuantitas Alutsista, Indonesia masih jauh dari patokan angkatan laut dunia yakni Amerika Serikat yang mana angkatan lautnya berada dalam kategori *blue water navy* seperti yang ada di dalam pokok pikiran Mahan. Selain itu dari segi anggaran pertahanan yang ada, Indonesia belum menggapai kata yang cukup. Akan dibahas dalam paragraf selanjutnya secara lebih mendalam. Hal ini menunjukkan mengapa perkembangan strategi kemaritiman berjalan stagnan yakni dengan

kurangnya keseriusan pemerintah dan DPR untuk terus memberikan kontribusi yang tinggi untuk memperkuat TNI, khususnya TNI-AL yang dalam hal ini dapat menjadi penopang penting strategi implementasi poros maritim dunia.

Minimum Essential Force atau yang dikenal dengan singkatan MEF sesungguhnya adalah sebuah proses modernisasi alutsista yang dimiliki Indonesia. Baik dari segi peningkatan kualitas, maupun penambahan jumlah armada tempur dan persenjataan. Target MEF dicanangkan pada tahun 2007 oleh Pemerintah RI, yang berlaku hingga tahun 2024. Terdiri dari tiga komponen utama yakni komponen postur, yakni kekuatan, gelar (persebaran penempatan), dan kemampuan. Sejalan dengan itu Sisriadi (Brigadir Jenderal) mengatakan bahwa yang dibangun dalam MEF adalah kekuatan daya tembak, daya gerak atau manuver.¹⁹ Tiga poin ini, termasuk dua tambahan dari Sisriadi menjadi tolok ukur yang realistis, yakni sebagai patokan relevan.

¹⁸ JMOL. 17 November, 2014. "Wujudkan Poros Maritim Dunia dengan Blue Water Navy, Mungkinkah?", dalam Defense, diakses pada 30 Mei 2017, <http://jurnalmaritim.com/2014/11/wujudkan-poros-maritim-dunia-dengan-blue-water-navy-mungkinkah/>

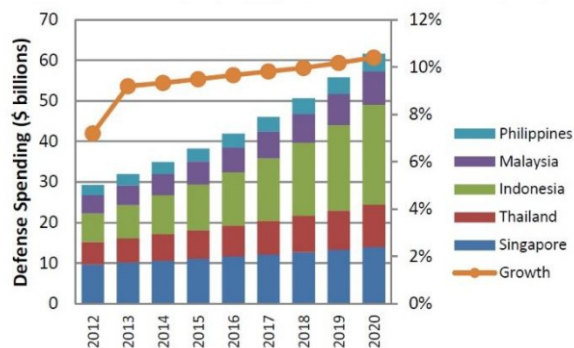
¹⁹ The Global Review. 22 Oktober, 2013. Cepat Atau Lambat TNI Akan Menjadi Macan Asia, diakses pada 30 Mei 2017, http://www.theglobal-review.com/contentdetail.php?lang=id&id=13677&type=115#.V70s4_5iLQdV

Lebih lanjut, MEF yang kemudian dipahami sebagai target utama pemenuhan alutsista harus disokong dengan kualitas dan kuantitas prajurit TNI sebagai garda terdepan pertahanan negara. Hal ini termasuk membahas keunggulan Indonesia, yang mana Indonesia memiliki jumlah terbesar di Asia Tenggara sebanyak 584 penduduk per personil.²⁰ Dari sumber data yang lain dan lebih terbaru, situs pengukur kekuatan militer negara-negara di dunia GlobalFirePower.com mengatakan bahwa saat ini terdapat 476 ribu personel aktif dan 400 ribu personel cadangan.²¹ Yang terakhir, didapatkan bahwa Angkatan Laut hanya memiliki 76 ribu personel aktif.²² Artinya kemudian MEF tidak dapat ditopang tanpa adanya peningkatan-peningkatan yang seharusnya terkejar oleh pemerintah untuk mewujudkan target 2020 dan 2024. Diperlukan keseriusan yang tinggi untuk mencapai target MEF.

²⁰ Connie Rahakundini Bakrie, *Pertahanan Negara dan Postur TNI Ideal*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2007, hal. 162.

²¹ GlobalFirePower.com, *Indonesia Military Strength*, 12 Mei 2015, diakses pada 30 Mei 2017. http://www.globalfirepower.com/country-military-strength-detail.asp?country_id=Indonesia

²² Investor Daily Indonesia, *TNI AD Takkan Tambah Personel Tahun Ini*, 25 Januari 2012, diakses pada 30 Mei 2017. <http://id.beritasatu.com/home/tni-ad-takkan-tambah-personel-tahun-ini/28691>



Grafik 1: Anggaran belanja pertahanan 5 besar ASEAN (2012 s.d. 2020)

(Sumber: <http://jakartagreater.com/wp-content/uploads/2014/03/defence-asean.jpg>, 2015)

Belanja pemerintah akan kebutuhan utama negara di bidang pertahanan, yang disebutkan pada data yang tersedia pada *Budget In Brief* APBNP 2015 didapatkan bahwa negara telah membelanjakan 7,8% dari total APBN sebesar 102,3 triliun untuk meningkatkan kapabilitas pertahanan,²³ mencakup yang telah diajukan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo yang berkomitmen untuk memperkuat matra laut dan udaranya sebagai prioritas pembangunan TNI ke depan.²⁴ Adapun peningkatan kebutuhan anggaran jika dibandingkan dengan 5 besar negara di

²³ Republik Indonesia, *Budget in Brief APBNP 2015*, Maret 2015, hal. 20.

²⁴ Swandhana, Op. Cit.

regional Asia Tenggara, Indonesia tampaknya masih berada di urutan ketiga karena pada urusan dalam negeri Indonesia masih membelanjakan anggaran dalam APBN-nya untuk mencakupi kebutuhan pemenuhan pelayanan publik atau masyarakat.²⁵ Hal ini dapat dimaklumi penulis mengingat di dalam perekonomian, Indonesia yang masih tergolong *emerging* ini harus menghadapi kenyataan lain seperti masalah-masalah sosial, kesehatan, dan kemiskinan untuk itu dibentuklah jaring pengaman sosial.

Lebih lanjut anggaran ini dapat ditilik kembali melalui progres yang dibuat oleh Kementerian Pertahanan pada tahun ini. Anggaran kembali berkurang menjadi 99,5 triliun dengan keterangan yang tercantum dalam *Budget in Brief*. Penambahan alutsista dan non alutsista fasilitas serta sarana-prasarana 20% dan pengadaan 143 unit Rantis (matra darat); Pengadaan 130 unit KRI, KAL, Alpung, Ranpur, Rantis (matra laut); Pesawat yang siap operasional sebanyak 150 unit (matra udara).²⁶ Kendati demikian, pemangkasan 7 triliun ini kemudian dikeluhkan oleh beberapa pihak,

utamanya dari Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu yang merasa bahwa anggaran harus tetap naik meskipun nilai tukar Rupiah terhadap Dolar melemah. Mengingat banyak sekali kebutuhan pertahanan yang harus dibeli dan diadakan seperti contohnya rencana Kementerian Pertahanan yang akan segera membeli satu skuadron pesawat Sukhoi Su-35 untuk menggantikan pesawat F5 Tiger yang makin uzur.²⁷

TNI-AL pada tahun ini kebagian dana sebesar Rp 1,19 triliun. Meliputi kontrak alutsista Rp 902,9 miliar, sarana prasarana Rp 167,8 miliar, dan perlengkapan personel Rp 121,6 miliar.²⁸ Hal ini merupakan sebuah kewajiban, mengingat anggaran TNI tersentral pada Kementerian Pertahanan, sehingga kontrol penggunaan ada pada Kemenhan. Namun yang perlu dicermati adalah apakah anggaran ini telah disebar merata pada tiga matra, dan sesuai dengan

²⁷ Indonesianmilitary.com. 7 September, 2015. Anggaran Pertahanan Indonesia Tahun 2016 Turun 7 Triliun, diakses pada 30 Mei 2017, <http://www.indonesianmilitary.com/2015/09/anggaran-pertahanan-indonesia-tahun.html>

²⁸ Liputan6.com. 7 Januari, 2016. "Dapat Anggaran Rp 1,19 Triliun, TNI AL Beberkan Pengadaan 2016", dalam Peristiwa. Diakses pada 30 Mei 2017. <http://news.liputan6.com/read/2406615/dapat-anggaran-rp-119-triliun-tni-al-beberkan-pengadaan-2016>

²⁵ Republik Indonesia, Op. Cit.

²⁶ Republik Indonesia, Budget in Brief APBNP 2016, hal. 25.

(Sumber: GlobalSecurity.org, 2015).

CURRENT STRENGTH	China	India	S. Korea	Indonesia	Taiwan	Japan	Singapore	Australia
Total personnel	2,285,000	1,325,000	687,000	302,000	290,000	230,300	72,500	54,747
Main battle tanks	6,550	4,047	2,810	0	926	880	196	149
Combat aircraft	1,907	655	498	96	509	340	104	109
Major surface ships	80	45	47	30	26	52	12	12
Submarines	65	16	13	2	4	16	4	6
2010 defence budget	\$78bn	\$32bn	\$26.5bn	\$5.3bn	\$9.3bn	\$57bn	\$11.5bn	\$21.3bn

Sources: International Institute for Strategic Studies, Jane's Information Group, GlobalSecurity.org, wire agencies

© GRAPHIC NEWS

porsi kebutuhan masing-masing matra. Dalam perwujudan implementasi poros maritim, sudah seharusnya TNI-AL mendapatkan anggaran terbesar utamanya penjagaan border yang didominasi oleh batas-batas laut sehingga memerlukan anggaran yang lebih komprehensif. Ke depan, perencanaan anggaran TNI secara umumnya akan terus ditingkatkan. Presiden Jokowi menegaskan bahwa jika pertumbuhan ekonomi berada di angka 6%, maka ada kepastian bahwa anggaran pertahanan akan dinaikkan hingga pada angka 1,5% dari Pendapatan Domestik Bruto atau jika dirupiahkan senilai 250 triliun merata di semua matra, TNI-AD, AL, dan AU.²⁹ Penambahan anggaran ini adalah salah satu upaya realisasi *Wold Class Navy*, utamanya dalam kaitannya dengan modernisasi alutsista dan peningkatan kesejahteraan prajurit TNI secara umumnya, dan TNI-AL secara khusus.

Tabel 1: Pertahanan Indonesia dibanding negara lain di Asia dalam angka

²⁹ Viva.co.id. 23 Februari, 2016. "Jokowi Minta TNI Siapkan Rencana Anggaran Alutsista Rp250 T", dalam Nasional, diakses pada 30 Mei 2017, <http://nasional.news.viva.co.id/news/read/739430-jokowi-minta-tni-siapkan-rencana-anggaran-alutsista-rp250-t>

Terlepas dari strategi-strategi yang relevan dalam kondisi riil yang ada di internal TNI-AL, maka secara teknis akan dibahas di sini. Dan berbicara mengenai MEF, yang merupakan dimensi ideal yang akan dicapai pihak TNI Angkatan Laut yang merupakan salah satu komponen negara dalam menghadapi arus deras *arms race* yang terjadi di tingkat regional. Terutama berbicara mengenai Asia pada umumnya. Penulis menyertakan tabel di atas sebagai perbandingan dari sejauh mana konsentrasi negara-negara yang ada di Asia kemudian dikembalikan lagi pada Indonesia dalam memandang pentingnya anggaran pertahanan sebagai salah satu upaya negara dalam melindungi kedaulatannya.

Dari data yang telah disertakan di atas dapat dilihat jumlah alutsista yang dimiliki Indonesia dibandingkan dengan negara lain. Di dalam kawasan laut yang

rawan terjadinya pelanggaran kedaulatan, dalam bentuk besar seperti kasus masuknya Kapal Patroli Malaysia ke wilayah perairan Indonesia, maupun dalam bentuk kecil seperti pencurian ikan yang sering terjadi di kawasan timur laut Indonesia yang berbatasan dengan Samudra Pasifik.³⁰ Jika dibandingkan pada *Minimum Essential Force*, Indonesia memiliki 148 Kapal Perang (KRI) yang mana terbagi atas beberapa kelas dan tipe. Selisih 2 dari yang dibutuhkan MEF. Tentu saja hal ini harus dilengkapi melalui penyertaan dan peningkatan konsentrasi sekaligus kapabilitas Angkatan Laut yang dapat menjangkau seluruh lautan yang dikuasai Republik Indonesia mulai dari laut teritorial, zona tambahan, landas kontinen, dan pada akhirnya ZEE seperti yang telah diatur dalam UNCLOS. Hal ini seperti yang tercantum pada pasal 56 ayat (1) poin b (iii)

³⁰ Dalam perkembangan terbaru, TNI Angkatan Laut melalui Pangkoarmatim Laksda Darwanto mengklaim bahwa sudah jarang terlihat pencurian ikan di kawasan timur. Hal ini menurutnya merupakan wujud dari komitmen pemerintahan RI dalam mengatasi pencurian ikan melalui sinergi antara Kementerian Kelautan dan Perikanan dan TNI Angkatan Laut. Simak selengkapnya di Viva.co.id, "TNI Klaim Laut Kawasan Timur Sepi Pencurian Ikan", dalam Nasional, 21 Mei 2015, diakses pada 30 2017 .
<http://nasional.news.viva.co.id/news/read/628371-tni-klaim-laut-kawasan-timur-sepi-pencurian-ikan>

yang memberikan *legal standing* terhadap negara-negara pantai untuk melindungi secara ekologis, ekonomis, maupun dalam segi pendekatan keamanan laut.³¹

Menghadapi persoalan, geliat pemerintah masih belum terlihat maksimal. Meskipun DPR telah menyetujui untuk penambahan anggaran pertahanan terutama yang berkaitan dengan kemaritiman yakni Angkatan Udara dan terutama Angkatan Laut, kondisi riil seperti tidak siapnya pangkalan laut dan udara yang tersebar di titik-titik yang direncanakan akan dinaikkan statusnya menjadi pangkalan utama seperti yang disampaikan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Ryamizard Ryacudu.³² Meski menurut Limbong dalam bukunya hal ini dapat dikatakan kemajuan dalam politik anggaran yang berpihak pada kebijakan anggaran yang telah beralih dari paradigma pembangunan daratan kepada pembangunan yang lebih maritim sentris.³³

Namun Machfudz Siddiq, Ketua Komisi I

³¹ United Nations Convention on Law Of the Sea (UNCLOS) 1982.

³² Swandhana, Geliat TNI Membangun Armada Maritim Jokowi, 6 Oktober 2015, diakses pada 30 Mei 2017. <http://dhan.staff.ub.ac.id/geliat-tni-membangun-armada-maritim-jokowi/>

³³ Bernhard Limbong, Poros Maritim, Pustaka Margaretha, Jakarta, 2014, hal. 368 & 369.

DPR-RI bidang Pertahanan dan Hubungan Luar Negeri berujar bahwa pembangunan harus dimulai dari improvisasi dan bahkan pembangunan dari infrastruktur dasar yang dibutuhkan dalam kelengkapan suatu pelabuhan atau bandara militer seperti: landasan pacu, hanggar, dan dermaga kapal perang.³⁴

Satu kendala lagi adalah tumpang tindih kewenangan antara Kementerian Kelautan dan Perikanan, TNI Angkatan Laut, dan Polair. Belum lagi ada lembaga-lembaga lain seperti Bakamla yang juga merasa institusinya berhak sebagai *coastal defense*, yang artinya diperlukan landasan hukum yang jelas dan pasti untuk memastikan bahwa tidak saling tumpah tindih kewenangan. Selama Bakamla berdiri, ada lagi sebuah Satgas 115 IUU Fishing yang ditugaskan untuk memberantas penangkapan ikan ilegal yang kerap kali meresahkan nelayan. Meskipun fungsinya sebagai tim gabungan dalam urusan pemberantasan penangkapan ikan ilegal, namun menurut pakar hukum laut Margarito Kamis, hal ini menyalahi aturan

undang-undang yang berlaku.³⁵ Mengingat fungsi Bakamla sebagai *coast guard* yang diiringi dengan kapabilitas TNI-AL yang masih merupakan *green water navy*, yang notabene mencakup wilayah pantai. Sudah seharusnya pemerintah mempertegas aturan dengan Presiden mengeluarkan Perpres dan bahkan Undang-Undang untuk menjamin bahwa lembaga-lembaga yang berwenang di laut tidak saling jegal dan berebut kewenangan untuk mengamankan wilayah laut.³⁶

Dari penjelasan yang dapat diuraikan penulis di atas, maka dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa hipotesis yang diajukan berupa “Efektivitas kerja TNI-AL perlu ditingkatkan, hal tersebut dikarenakan banyak yang berpendapat bahwa etos kerja TNI-AL belum maksimal dan mampu dalam menangani isu-isu

³⁵ JPNN.com. 7 Oktober, 2015. “Kewenangan Penindakan Satgas IUU Munculkan Tumpang Tindih”, dalam Hukum. Diakses pada 26 Agustus 2016. <http://www.jpnn.com/read/2015/10/07/331240/Kewenangan-Penindakan-Satgas-IUU-Munculkan-Tumpang-Tindih/>

³⁶ Bisnis.com. 21 September, 2015. Dinilai Tumpang-Tindih, Pemerintah Revitalisasi Peran Badan Keamanan Laut, dalam Nasional. Diakses pada 26 Agustus 2016. <http://kabar24.bisnis.com/read/20150921/15/474771/dinilai-tumpang-tindih-pemerintah-revitalisasi-peran-badan-keamanan-laut>

³⁴ *Ibid.*

keamanan dan pertahanan di wilayah perairan Indonesia. Hal tersebut disebabkan oleh 2 sebab, yaitu pertama akibat tidak adanya pembagian kerja yang rinci antara TNI-AL, Bakamla, dan Polair. Kedua, minimnya peran dan kesadaran masyarakat di pesisir laut maupun yang bukan, untuk menjaga keamanan laut Indonesia yang mana seharusnya menjadi tanggung jawab bersama seluruh rakyat NKRI.” Ternyata harus disokong penuh oleh pemerintah dan TNI-AL sebagai pemangku kebijakan.

Tentu kemudian dikembalikan lagi pada judul karya tulis ilmiah ini yakni seberapa jauh TNI-AL mewujudkan *World Class Navy* yang berpedoman pada target MEF yang sudah disusun sejak 2007. Hal ini merujuk pada tiga tolok ukur utama yang dirinci pada bab pembahasan. Yang pertama yakni aspek strategis, penulis menjelaskan bahwa dalam melakukan analisis-sintesis terhadap kebijakan yang digunakan TNI-AL ini maka ada kalanya membandingkan kebijakan yang ada dengan teori klasik seperti pemikiran Mahan dan Corbett. Dan ternyata setelah melakukan pendalaman lebih lanjut, penulis mendapati bahwa strategi yang ada telah menyentuh ke akar permasalahan dan

menjawab kebutuhan Indonesia baik dari aspek geopolitik maupun ekonomi. Yang kedua adalah menilik MEF yang kemudian harus dibandingkan dengan realitas dan progres yang telah ditempuh oleh pemerintah hingga saat ini. MEF diproyeksikan menggapai dua gol yakni pada tahun 2020 dan tahun 2024 yang mana artinya pada akhir masa pemerintahan Presiden Jokowi ini alutsista TNI dipenuhi dengan mutakhir. MEF sedang dalam proses yang panjang untuk mencapainya dan masih berada pada koridor yang benar.

Yang ketiga adalah masalah anggaran pertahanan dan juga politik anggaran yang terjadi di antara Pemerintah dan DPR. Di dalam kasus ini ditemukan beberapa masalah yang menunjukkan bahwa anggaran pertahanan di APBNP 2015 dengan anggaran pertahanan yang berada di APBN 2016 menurun sebesar 7 triliun. Hal ini kemudian dapat diklasifikasikan sebagai satu bentuk hambatan kecil yang harus diperbaiki di kemudian hari. Artinya perlu porsi anggaran yang cukup dan matang pada tahun berikutnya yakni 2017. Tentu apabila target pemerintah dalam menggenjot stimulus ekonomi terealisasi.

Dan yang terakhir adalah bagaimana respons pemerintah selama ini dalam mengatasi kasus-kasus yang terjadi di perairan Indonesia antara TNI-AL dengan institusi lain. Selama ini belum ada aturan hukum yang benar-benar menjelaskan perbedaan peran antara tiga institusi penegak hukum di perairan Indonesia. Selain itu, masih maraknya kasus IUU Fishing menunjukkan masih lemahnya TNI-

AL baik dalam segi koordinasi dengan institusi lain, maupun tolok ukur alutsista yang memadai. Tentu hal ini menjadi evaluasi besar bagi pemerintah untuk selalu memperhatikan aspek pertahanan sebagai pilar kelima dalam mewujudkan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia.

Artikel Daring, Berita Daring, dan Laman Web Resmi

- AntaraNews.com. 13 November, 2014. Di EAS, Jokowi beberkan lima pilar Poros Maritim Dunia. [Online]. Tersedia dalam: <http://www.antaraneews.com/berita/464097/di-eas-jokowi-beberkan-lima-pilar-poros-maritim-dunia> (Diakses pada 28 Juli 2016).
- BeritaSatu.com. 16 Oktober, 2013. Mewujudkan Indonesia sebagai Negara Maritim yang Maju. [Online]. Tersedia dalam: <http://www.beritasatu.com/ekonomi/144599-mewujudkan-indonesia-sebagai-negara-maritim-yang-maju.html> (Diakses pada 23 Juli 2016).
- Bisnis.com. 21 September, 2015. Dinilai Tumpang-Tindih, Pemerintah Revitalisasi Peran Badan Keamanan Laut, dalam Nasional. <http://kabar24.bisnis.com/read/20150921/15/474771/dinilai-tumpang-tindih-pemerintah-revitalisasi-peran-badan-keamanan-laut> (Diakses pada 26 Agustus 2016).
- GlobalFirePower.com. 12 Mei, 2015. Indonesia Military Strength.[Online]. Tersedia dalam: http://www.globalfirepower.com/country-military-strength-detail.asp?country_id=Indonesia (Diakses pada 6 Agustus 2016).
- GlobalSecurity.org. 2015. Mahan & The Influence of Sea Power Upon History. [Online]. Tersedia dalam: <http://www.globalsecurity.org/military/systems/ship/mahan.htm> (Diakses pada 23 Juli 2016).
- Hargo, Dody Usodo, 2013. "Jumlah Pulau di Indonesia", dalam Ruang Opini. [Online]. Tersedia dalam: <http://www.dkn.go.id/site/index.php/ruang-opini/126-jumlah-pulau-di-indonesia> (Diakses pada 6 Agustus 2016).
- Indonesianmilitary.com. 7 September, 2015. Anggaran Pertahanan Indonesia Tahun 2016 Turun 7 Triliun. [Online]. Tersedia dalam: <http://www.indonesianmilitary.com/2015/09/anggaran-pertahanan-indonesia-tahun.html> (Diakses pada 26 Agustus 2016).
- Investor Daily Indonesia. 25 Januari, 2012. TNI AD Takkan Tambah Personel Tahun Ini. [Online]. Tersedia dalam: <http://id.beritasatu.com/home/tni-ad-takkan-tambah-personel-tahun-ini/28691> (Diakses pada 6 Agustus 2016).
- JMOL. 17 November, 2014. "Wujudkan Poros Maritim Dunia dengan Blue Water Navy, Mungkinkah?", dalam Defense. [Online]. Tersedia dalam: <http://jurnalmaritim.com/2014/11/wujudkan-poros-maritim-dunia-dengan-blue-water-navy-mungkinkah/> (Diakses pada 5 Agustus 2016).
- JPNN.com. 7 Oktober, 2015. "Kewenangan Penindakan Satgas IUU Munculkan Tumpang Tindih", dalam Hukum. <http://www.jpnn.com/read/2015/10/07/331240/Kewenangan-Penindakan-Satgas-IUU-Munculkan-Tumpang-Tindih/> (Diakses pada 26 Agustus 2016).
- Kompas.com. 21 Mei, 2014. "'Nawa Cita", 9 Agenda Prioritas Jokowi-JK" dalam News/Nasional. <http://nasional.kompas.com/read/2014/05/21/0754454/.Nawa.Cita.9.Agenda.Prioritas.Jokowi-JK> (Diakses pada 18 Agustus 2016).

- Liputan6.com. 7 Januari, 2016. "Dapat Anggaran Rp 1,19 Triliun, TNI AL Beberkan Pengadaan 2016", dalam Peristiwa. <http://news.liputan6.com/read/2406615/dapat-anggaran-rp-119-triliun-tni-al-beberkan-pengadaan-2016>
- Merdeka.com. 27 Februari, 2015. "TNI AL akan bangun kekuatan Armada Tengah & Armada Pusat", dalam Peristiwa. [Online]. Tersedia dalam: <http://www.merdeka.com/peristiwa/tni-al-akan-bangun-kekuatan-armada-tengah-armada-pusat.html> (Diakses pada 6 Agustus 2016).
- Nugroho, Adityo, 2015. "Membedah gagasan A.T Mahan tentang Sea Power", dalam Quarter Deck, 2 April [Online]. Tersedia dalam: <http://jurnalmaritim.com/2015/04/membedah-gagasan-a-t-mahan-tentang-sea-power/> (Diakses pada 6 Agustus 2016).
- Swandhana, 2015. Geliat TNI Membangun Armada Maritim Jokowi. 6 Oktober 2015. [Online]. Tersedia dalam: <http://dhan.staff.ub.ac.id/geliat-tni-membangun-armada-maritim-jokowi/> (Diakses pada 6 Agustus 2016).
- The Global Review. 22 Oktober, 2013. Cepat Atau Lambat TNI Akan Menjadi Macan Asia, http://www.theglobal-review.com/content_detail.php?lang=id&id=13677&type=115#.V70s45iLQdV (Diakses pada 28 Juli 2016).
- Viva.co.id, 2015. "TNI Klaim Laut Kawasan Timur Sepi Pencurian Ikan", dalam Nasional, 21 Mei 2015 <http://nasional.news.viva.co.id/news/read/628371-tni-klaim-laut-kawasan-timur-sepi-pencurian-ikan> (Diakses pada 6 Agustus 2016).
- Viva.co.id. 23 Februari, 2016. "Jokowi Minta TNI Siapkan Rencana Anggaran Alutsista Rp250 T", dalam Nasional, <http://nasional.news.viva.co.id/news/read/739430-jokowi-minta-tni-siapkan-rencana-anggaran-alutsista-rp250-t> (Diakses pada 26 Agustus 2016).

Perkuliahan

- Susanto, Joko. 2015. Strategi Kelautan dan Geopolitik Kemairitiman – SOH322: The Development of Maritime Strategy. Departemen Hubungan Internasional, FISIP Universitas Airlangga, disampaikan pada tanggal 1 Oktober.

PROFIL PENULIS



Nama Panggilan : Probo Darono Yakti
Tempat, Tanggal Lahir : Yogyakarta, 15 Juli 1995
No HP : 08131047301
E-mail : probo_dy@live.com
Alamat Twiter/Path/Line : @masprob

Riwayat Organisasi dan Kepengurusan

- SDN Pucang 3 Sidoarjo
- SMPN 5 Sidoarjo
- SMAN 5 Surabaya
- Hubungan Internasional, FISIP, Universitas Airlangga

Riwayat Organisasi dan Kepengurusan

- Kadiv Litbang LPM Mercusuar Universitas Airlangga
- Project Officer HI CUP 2015
- Anggota Perwakilan Kelas SMAN 5 Surabaya

Riwayat Delegasi di Tingkat Nasional

- Delegasi Universitas Airlangga untuk Pelatihan Pemimpin Bangsa #9
- Delegasi Universitas Airlangga untuk PNMHI XXVIII Surakarta